



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIF WIBOWO**
2. Jabatan : **KETUA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI PROTEKSI TANAMAN**
3. NHK : **972317**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.869.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/110 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/90 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 862 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.879.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 197.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000



4. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 543.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.618.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.618.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.